



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHP)

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3>

Received: 08 Februari 2024, Revised: 05 Maret 2024, Publish: 20 Maret 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Desa Mekarsari Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut (Studi Tentang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Mekarsari Tahun 2023)

Nazla Rafilah Wudianto^{1*}, Tomi Setiawan²

¹Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Indonesia, nazla20002@mail.unpad.ac.id

²Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Indonesia, Tomi.setiawan@unpad.ac.id

*Corresponding Author: nazla20002@mail.unpad.ac.id

Abstract: *This research aims to analyze and evaluate the implementation of participatory development planning in Mekarsari Village, Cikajang District, Garut Regency, especially in the context of infrastructure development planning. The research method used is qualitative research with a case study approach. Data was collected through in-depth interviews, participatory observation, and analysis of documents related to development planning. The research results show that Mekarsari Village has implemented participatory development planning by actively involving community participation in the decision-making process regarding village infrastructure development. Participatory steps such as village meetings, group discussions, and other participatory activities have become an integral part of the planning process. However, there are several obstacles such as a lack of public understanding of the importance of participation, and technical obstacles in implementing development plans. This research provides recommendations for increasing the effectiveness of participatory development planning in Mekarsari Village. These recommendations include efforts to increase community understanding about participation in development, more active involvement of the village government, and increased coordination between relevant stakeholders. In conclusion, participatory development planning in Mekarsari Village has great potential to improve the quality of village infrastructure development, but further efforts are needed to overcome existing obstacles.*

Keyword: *Participatory Planning, Development Deliberation, Village Infrastructure.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi implementasi perencanaan pembangunan partisipatif di Desa Mekarsari, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, khususnya dalam konteks perencanaan pembangunan infrastruktur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen

terkait perencanaan pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Mekarsari telah menerapkan perencanaan pembangunan partisipatif dengan melibatkan aktif partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan infrastruktur desa. Langkah-langkah partisipatif seperti musyawarah desa, diskusi kelompok, dan kegiatan partisipatif lainnya telah menjadi bagian integral dari proses perencanaan. Namun, terdapat beberapa kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya partisipasi, dan kendala teknis dalam pelaksanaan rencana pembangunan. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan partisipatif di Desa Mekarsari. Rekomendasi tersebut meliputi upaya peningkatan pemahaman masyarakat tentang partisipasi dalam pembangunan, pelibatan lebih aktif dari pihak pemerintah desa, dan peningkatan koordinasi antarstakeholder terkait. Kesimpulannya, perencanaan pembangunan partisipatif di Desa Mekarsari memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur desa, namun diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi kendala-kendala yang ada.

Kata Kunci: Perencanaan Partisipatif, Musyawarah Pembangunan, Infrastruktur Desa

PENDAHULUAN

Desa Mekarsari, yang terletak di Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, menjadi fokus penelitian ini dalam rangka menggali lebih dalam mengenai perencanaan pembangunan partisipatif, khususnya dalam konteks pengembangan infrastruktur desa. Perencanaan pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat adalah suatu upaya untuk memastikan bahwa setiap aspek pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Desa Mekarsari diidentifikasi sebagai objek penelitian karena perencanaan pembangunan partisipatif di dalamnya belum mencapai optimalitas, terutama terlihat dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa.

Musrenbang merupakan salah satu tahap penting dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif di tingkat desa. Dalam konteks Desa Mekarsari, terdapat kendala terkait keterlibatan stakeholders yang belum optimal, terutama dalam memastikan partisipasi aktif mereka dalam proses perumusan kebijakan pembangunan. Selain itu, keterbatasan pengetahuan formal dan felt needs yang dimiliki oleh perwakilan masyarakat juga menjadi perhatian, mengingat kedua aspek tersebut memiliki peran sentral dalam memastikan kesesuaian rencana pembangunan dengan kebutuhan riil masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya optimalitas perencanaan pembangunan partisipatif di Desa Mekarsari, dengan fokus pada pengembangan infrastruktur desa dalam tahun 2023. Dengan merinci aspek-aspek seperti peran aktor (pelaku), pengetahuan (knowledge), dan ruang (spaces) dalam proses perencanaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai hambatan dan potensi solusi untuk meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan partisipatif di tingkat desa.

Melalui penerapan metode penelitian kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data seperti studi kepustakaan, observasi lapangan, wawancara, dan studi dokumentasi, penelitian ini berupaya menggambarkan kondisi aktual serta dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif di Desa Mekarsari. Temuan dan rekomendasi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan praktik perencanaan pembangunan partisipatif, tidak hanya bagi Desa Mekarsari tetapi juga sebagai sumbangan bagi pemahaman teoritis dan praktis di tingkat lebih luas.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan di Desa Mekarsari, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, dengan fokus pada perencanaan pembangunan partisipatif, khususnya dalam pengembangan infrastruktur desa. Lokasi penelitian dipilih karena adanya indikasi bahwa perencanaan pembangunan partisipatif di desa tersebut belum mencapai tingkat optimal, terutama terlihat pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa.

Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai teknik, termasuk studi kepustakaan untuk memahami dasar konsep perencanaan partisipatif dan infrastruktur desa, serta teori-teori terkait. Metode observasi dilakukan secara langsung pada kegiatan Musrenbang dan situasi terkait di Desa Mekarsari. Wawancara mendalam dilakukan dengan berbagai pihak yang terlibat, seperti perwakilan masyarakat, tokoh desa, pemerintah desa, fasilitator musrenbang, dan stakeholders terkait. Studi dokumentasi melibatkan analisis dokumen perencanaan desa, notulensi Musrenbang, dan kebijakan terkait.

Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih informan berdasarkan kriteria tertentu, seperti perwakilan masyarakat yang terlibat dalam Musrenbang, tokoh masyarakat, pemerintah desa, dan fasilitator musrenbang. Analisis data dilakukan secara induktif dengan pendekatan tematik, melibatkan proses coding untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antarinformasi.

Dalam menjalankan penelitian ini, etika penelitian dijaga dengan memastikan persetujuan dan partisipasi sukarela dari informan. Kerahasiaan data dijaga, dan keinginan informan yang tidak ingin diidentifikasi dihormati. Metode penelitian ini diharapkan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya optimalitas perencanaan pembangunan partisipatif di Desa Mekarsari, terutama dalam konteks pengembangan infrastruktur desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menyoroti berbagai aspek yang mempengaruhi kurangnya optimalitas perencanaan pembangunan partisipatif di Desa Mekarsari, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut. Analisis data menunjukkan bahwa proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di desa tersebut masih menghadapi tantangan dalam mencapai partisipasi aktif dari seluruh stakeholders. Meskipun kegiatan ini seharusnya menjadi platform inklusif untuk menghimpun aspirasi masyarakat, terdapat kelompok *stakeholders* yang belum terlibat secara optimal, menciptakan kesenjangan dalam representasi masyarakat desa.

Pada tahap pra-Musrenbang, ditemukan bahwa pengetahuan formal dan felt needs yang dimiliki oleh perwakilan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Beberapa informan menunjukkan kurangnya pemahaman mengenai rencana pembangunan desa dan urgensi infrastruktur tertentu. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas masukan yang diberikan dalam proses perumusan kebijakan pembangunan.

Selanjutnya, teknik perumusan usulan prioritas dengan sistem voting pada tahap pra-Musrenbang memunculkan keterbatasan dalam memperhitungkan kepentingan minoritas atau kebutuhan khusus yang mungkin tidak terwakili dengan baik. Hasil voting dapat mencerminkan mayoritas, namun ada potensi mengesampingkan suara minoritas yang mungkin memiliki pandangan atau kebutuhan yang berbeda.

Temuan hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa perlu adanya upaya meningkatkan keterlibatan aktif semua stakeholders dalam Musrenbang untuk memastikan representasi yang lebih merata. Sosialisasi yang lebih intensif dari pihak Bappeda Kota Bandung tentang peraturan, prosedur, dan tahapan Musrenbang hingga tingkat RT di Desa Mekarsari menjadi kunci untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat.

Peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai rencana pembangunan desa perlu diperkuat melalui pendekatan edukatif dan penyuluhan. Diperlukan strategi komunikasi yang lebih efektif untuk menyampaikan informasi terkait prioritas pembangunan dan urgensi infrastruktur tertentu agar masyarakat dapat memberikan kontribusi yang lebih informasional dan bermakna.

Terakhir, mengenai teknik perumusan usulan prioritas, perlu dipertimbangkan metode yang lebih inklusif dan memperhitungkan keberagaman pandangan masyarakat. Proses ini dapat melibatkan dialog lebih lanjut, diskusi kelompok, atau metode lain yang memungkinkan seluruh pandangan masyarakat didengar dan dipertimbangkan. Melalui pembahasan ini, diharapkan dapat merumuskan rekomendasi dan strategi yang dapat meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan partisipatif di Desa Mekarsari, dan sekaligus memberikan wawasan konstruktif untuk pengembangan infrastruktur desa secara lebih inklusif.

Banyaknya usulan yang diajukan RT/RW yang tidak diakomodir di Desa Mekarsari Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut karena kesalahan yang sifatnya administratif, usulan tidak rinci ataupun tidak jelas, perkiraan biaya yang dibutuhkan yang tidak jelas, salahnya SKPD yang dituju, pada dasarnya dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman maupun pengetahuan ketua RT dan RW di Desa Mekarsari mengenai bagaimana seharusnya perencanaan tersebut dirumuskan, disusun dan dilakukan.

Disamping itu, penulis juga melihat kalau dalam penentuan skala prioritas usulan yang diajukan harus disesuaikan dengan keterangan dari sifat dan kondisi rencana kegiatan pembangunan. Kepekaan, pengetahuan dan pemahaman dari ketua RW dan RT mengenai kondisi wilayah maupun isu serta permasalahan yang timbul di masyarakat sangatlah diperlukan. Maka dari itu, pada tahap pra-Musrenbang keterlibatan warga sangatlah penting. Sayangnya, selain tidak dilibatkannya warga dalam pra-Musrenbang oleh ketua RT ataupun RW, pada tahap ini ketua RW memiliki pandangan bahwa semakin banyak usulan yang diajukan, maka semakin besar peluang usulan yang diajukan olehnya akan diakomodir. Dalam menentukan usulan skala prioritas, ketua RW melakukan dengan cara voting bukan mengedepankan musyawarah atau dialog dengan warga maupun RT.

Tindakan yang cenderung dilakukan oleh ketua RT/RW di Desa Mekarsari tersebut tidak dapat terlepas dari pentingnya sosialisasi mengenai mekanisme dan tahapan Musrenbang, ataupun petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis Musrenbang yang memang kurang optimal. Fakta di lapangan yang penulis temukan juga ternyata menunjukkan bahwa banyak ketua RT dan RW yang baru menjabat di Desa Mekarsari sehingga mereka tidak mengerti proses perencanaan pembangunan dalam Musrenbang. Namun adanya perpindahan pemegang jabatan ketua RW ataupun RT di Desa Mekarsari tidak diperhatikan atau mendapatkan perlakuan yang baik dalam hal pemberian pengetahuan terkait mekanisme dan tahapan Musrenbang, ataupun petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis Musrenbang yang memang kurang optimal oleh pihak pemerintah desa.

Berdasarkan pembahasan dan pemaparan mengenai pengetahuan (knowledge) dari para aktor yang terpilih terlibat dalam kegiatan Musrenbang Desa Mekarsari Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut yang telah penulis uraikan, secara umum penulis melihat bahwa perwakilan masyarakat, yaitu ketua RT dan ketua RW yang baru menjabat serta LKK, yaitu Karang Taruna di Desa Mekarsari mengalami lack of know how. Mereka tidak mengetahui peraturan, prosedur, mekanisme dan tahapan musrenbang, ataupun petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis Musrenbang. Hal ini terjadi karena sosialisasi yang diberikan oleh Pemerintah Desa hanya sampai tingkat RW. Sedangkan RT dan LKK tidak mendapatkan sosialisasi dari pemerintah desa. Ketua RT hanya memperoleh informasi jadwal Musrenbang dan usulan yang akan diajukan saja dari Ketua RW. Namun, warga tidak mendapatkan sosialisasi

maupun informasi apapun mengenai peraturan, prosedur, mekanisme dan tahapan musrenbang, ataupun petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis Musrenbang.

Merujuk pada uraian diatas penulis melihat bahwa pemahaman maupun pengetahuan mengenai formal knowledge dan felt needs dalam Musrenbang Desa Mekarsari cenderung lebih dipahami oleh aktor, seperti Ketua RW, BPD, dan aparatur Desa Mekarsari lainnya. Sedangkan ketua RT dan warga cenderung memiliki pengetahuan maupun pemahaman mengenai formal knowledge dan felt needs dalam rangkaian proses Musrenbang desa yang lebih terbatas.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa perencanaan pembangunan partisipatif di Desa Mekarsari, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, menghadapi sejumlah hambatan yang perlu segera diatasi untuk mencapai optimalitas. Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) masih mengalami kendala dalam mencapai partisipasi aktif dari semua stakeholders, menciptakan ketidakmerataan dalam representasi suara masyarakat desa. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam membangun kesadaran dan keterlibatan aktif masyarakat dalam menentukan arah pembangunan desa.

Ditemukan pula bahwa pengetahuan formal dan felt needs yang dimiliki oleh perwakilan masyarakat belum sepenuhnya memadai, menciptakan ketidaksetaraan dalam kontribusi dan pemahaman mereka terhadap rencana pembangunan desa. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai rencana pembangunan desa perlu menjadi fokus perbaikan untuk meningkatkan partisipasi yang lebih bermakna.

Teknik perumusan usulan prioritas dengan sistem voting juga menunjukkan keterbatasan dalam merangkul suara minoritas, menciptakan potensi pengesampingan kebutuhan khusus atau pandangan yang mungkin berbeda. Oleh karena itu, perlu diadopsi teknik perumusan prioritas yang lebih inklusif, memperhitungkan keragaman pandangan masyarakat.

Dalam konteks ini, direkomendasikan adanya upaya yang lebih intensif dalam sosialisasi dan edukasi masyarakat mengenai proses perencanaan pembangunan partisipatif, serta peningkatan kapasitas fasilitator musrenbang. Melalui upaya bersama, diharapkan Desa Mekarsari dapat mencapai perencanaan pembangunan partisipatif yang lebih efektif dan inklusif, menciptakan pembangunan yang lebih berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Kesimpulan ini menjadi landasan untuk pengembangan kebijakan dan praktik perencanaan pembangunan partisipatif yang lebih baik di tingkat desa.

REFERENSI

- Adhy Suhanda. (2012). Proses perencanaan Pembangunan Partisipatif di Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Rahayu Tahun 2007-2013) (Skripsi). *Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Padjadjaran*.
- Aichael, M. B. (2007). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Aji Suseno, D. (2016). *Analisis Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis UU Desa No. 6 Tahun 2014 di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang*. STIE Semarang.
- Arnstein, S. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35, 216-24.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Diterjemahkan oleh Achmad Fawaid dan Rianayati Kusmini Pancasari*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Cook, B. J. (2007). Woodrow Wilson's Ideas About Local Government Reform: A Regime Perspective on the New Push for Citizen Engagement in Public Administration. *Administration & Society*, 39(2), 294-314.
- Indri Noviani. (2016). Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Desa Kutamandiri Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kutamandiri Tahun 2015-2021) (Skripsi). *Jurusan Administrasi Publik FISIP Universitas Padjadjaran*.
- Kartasasmita, G. (1997). *Administrasi Pembangunan: Perkembangan, Pemikiran, dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Nugroho, R., & Wirihatolo, R. R. (2011). *Manajemen Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nengsih, R. (2013). *Perencanaan Pembangunan Jalan Mariwati-Jojogan*. Unpad.
- McGee, R. (2002). *The International Workshop on Participatory Planning Approaches for Local Governance*. Diakses dari www.participatoryplanning.org
- McGee, R. (2003). *Legal Frameworks for Citizen Participation: Synthesis Report*. Brighton, United Kingdom: Logo Link report, Institute for Development Studies, University of Sussex.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Schmitter, P. C. (2002). *Participation in Governance Arrangements: Is there any Reason to Expect it will Achieve Sustainable and Innovative Policies in a Multi-level Context? Dalam J. Grote & B. Gbikpi (Eds.), Participatory Governance: Political and Societal Implications*, Opladen: Leske + Budrich.
- Siagian, S. P. (2008). *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Silalahi, U. (2007). *Studi tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori dan Dimensi*. Bandung: Sinar Baru.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.